

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) KESEHATAN LINGKUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Propinsi/Kabupaten	: Sumatera Barat / Pesisir Selatan
Bidang	: Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Sub Komponen	: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Kegiatan Instansi Pelaksana	: Dinas Kesehatan

UKM ESENSIAL SEKUNDER

A. LATARBELAKANG

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
4. Permenkes No.46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas,Klinik Pratama, Tempat praktek MandiriDokter dan Tempat praktik mandiri dokter gigi.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Permenkes No.12 Tahun 2021 tentang Juknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bidang Kesehatan.
9. Kepmenkes Nomor 69/Menkes/SK/VIII/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK).

2. Gambaran Umum

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian terpadu dari pembangunan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan bathin, yang salah satu indikatornya adalah tingginya derajat kesehatan dan tingginya mutu kehidupan. Pembangunan manusia seutuhnya harus mencakup aspek jasmani dan kejiwaan, disamping aspek spiritual. Oleh karena itu pembangunan kesehatan ditujukan guna mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, produktif dan mempunyai daya saing yang tinggi.

Salah satu Strategi Pembangunan Kesehatan Nasional dan Propinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021 yaitu: ***“Menjamin Ketersediaan dan Pemerataan Sumber Daya Kesehatan”*** dengan menerapkan pembangunan daerah berwawasan kesehatan, yang berarti setiap upaya program pembangunan harus mempunyai kontribusi positif terhadap terbentuknya lingkungan dan perilaku yang sehat. Keadaan ini dapat dicapai dengan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta penerapan teknologi kesehatan secara tepat oleh petugas-petugas kesehatan yang didukung oleh peran serta aktif dari semua unsur dan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan berdasarkan Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan: ***“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan”***, telah berhasil menetapkan dasar-dasar, strategi dan paradigma pembangunan kesehatan yang baru yaitu ***“Paradigma Sehat”*** yang inti pokoknya menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak azazi manusia, kesehatan sebagai investasi bangsa, dan kesehatan menjadi titik sentral pembangunan nasional dan daerah.

Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan, diperlukan tolok ukur dan penilaian indikator kinerja sesuai dengan Renstra SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 juga merupakan sinergisitas perencanaan Pembangunan Kesehatan Nasional dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019 serta berpedoman juga pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dan Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030 serta didasari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan Tahun 2016 sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan indikator penetapan kinerja (TAPKIN) Tahun 2016.

B. TUJUAN

1. Pengusulan dana DAK Non Fisik
2. Pencapaian suatu program khususnya program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

C. OUTPUT DAN OUTCOME

No.	Sub Komponen	Jumlah Penerima	Target Output	Target Outcome
	Sewa Tempat Tunggu Kelahiran	1 Paket	Tersedianya Sewa Tempat Tunggu Kelahiran untuk ibu hamil dan ibu bersalin Ibu nifas dan pendamping)	Jumlah Dokumen
	Konsumsi ibu hamil dan pendamping	398 orang	Tersedianya Konsumsi untuk ibu hamil dan ibu bersalin Ibu nifas dan pendamping	Jumlah Dokumen
	Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar	66 orang	Adanya peningkatan Kompetensi Petugas dalam pelayanan Kegawat darurat Maternal dan Neonatal	Jumlah Dokumen
	Pelatihan KIA Terintegrasi	84 orang	Adanya peningkatan Kompetensi Petugas dalam pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen

D. PENERIMA MANFAAT

Penerima Manfaat dari kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten adalah petugas dan masyarakat langsung.

No	INSTANSI	KABUPATEN
1	DINAS KESEHATAN	PESISIR SELATAN

E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN **

No.	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Output	Satuan Biaya (Rp)	Usulan Kebutuhan Dana (Rp.)	Lokus	Kabupaten
1.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 paket	Rp.828.812.989,-	Rp.828.812.989,-	Dinas Kesehatan	Pesisir Selatan

E. DUKUNGAN APBD NON-DAK

Sumber Dana berasal dari DAU dan DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2023. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 mengusulkan alokasi dana sebesar Rp. 828.812.989 (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

F. ORGANISASI / INSTANSI PELAKSANA

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

G. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 dilakukan pemerintah secara Langsung ke masyarakat dan peraturan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Jadwal dan batasan waktu pelaksanaan kegiatan ini direncanakan bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023.

**Matriks Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023**

No.	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan Pelaksanaan												
2.	Pelaksanaan												

Rainan, 18 Januari 2023
Kepala Dinas kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



dr. H. Syahrizal Antoni SY, MPH
NIP. 19701104 200012 1 001